

ANALISIS KINERJA PENGOLAHAN KEUANGAN DAERAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN OPINI LAPORAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Andi Dahri Adi Patra¹, Ramlah²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

¹E-Mail: andidahri1959@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada hubungan positif dan logis antara kinerja pengelolaan keuangan daerah (X) dan Opini LHP BPK (Y), Hasil analisis penulis terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo tahun 2010-2014 untuk 7 variabel yang diamati yakni ; efektifitas belanja (X1), Efektifitas PAD (X2), Efisiensi belanja (X3), Pertumbuhan belanja (X4), Pertumbuhan PAD (X5), Keselarasan belanja (X6), Kemandirian belanja (X7), diperoleh hasil bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari keadaan kurang baik Pada tahun 2010 menjadi sangat baik pada tahun 2014. Selanjutnya jika diperbandingkan dengan Opini LHP-BPK pada tahun 2010 disclaimer, tahun 2011 disclaimer, tahun 2012 WDP, tahun 2013 disclaimer dan pada tahun 2014 WDP, terlihat bahwa ada tiga tahun (tahun 2010, 2012 dan 2014) menunjukkan hubungan yang searah atau positif dan dua tahun (tahun 2011 dan 2013) menunjukkan hubungan yang tidak searah atau negatif. Dengan demikian berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa; ada hubungan positif dan logis antara Kinerja Pengelola Keuangan Daerah (X) dengan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Y). Dengan demikian Pimpinan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok, Visi dan Misi-nya tidak terlalu focus dan berorientasi bagaimana memperoleh opini WDP atau WTP, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, karena dengan kinerja yang baik, akan menjadi peluang atau potensi bagi pemerintah daerah untuk memperoleh Opini yang baik (WDP, WTP) dari pihak Auditor

Kata kunci : Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, efektifitas, efisiensi, pertumbuhan, keselarasan belanja, kemandirian daerah dan Opini LHP-BPK

PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 25 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kedua paket UU tersebut merupakan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dengan memberi kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten-kota untuk mengurus rumah tangganya masing-masing, pada aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk kewenangan pengelolaan keuangan.

Reformasi pada sektor keuangan diatur dengan satu paket Undang-Undang yakni UU n

omor 17 tahun 2013, tentang Keuangan Negara, UU nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Ketiga paket Undang-Undang Keuangan tersebut merupakan amanah dan petunjuk bagi penyelenggara pemerintahan selaku entitas untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara transparan dan akuntabel melalui proses penatausahaan dan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP-- PP no.71 tahun 2010).

Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

pada pasal 56 ayat 4 UU nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan Laporan Keuangan telah diselenggarakan sesuai SAP, selanjutnya pada pasal 16 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah memuat opini meliputi: :

1. Opini yang paling baik adalah WTP (*Unqualified Opinion*)
2. Opini kedua adalah WDP (*Qualified Opinion*))
3. Opini paling buruk adalah Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimet Opinium*)

Hal yang menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2010 s/d 2014) Pemerintah Kota Palopo telah memperlihatkan upaya perbaikan kinerja dalam hal Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja serta aktivitas pelayanan publik yang lebih baik, namun disisi lain Opini LHP-BPK , atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo mendapat Opini: Tahun 2010 DISCLAIMER , tahun 2011 DISCLAIMER, tahun 2012 WDP, tahun 2013

DISCLAIMER dan tahun 2014 memperoleh WDP (Ikhtiar LHPs BPK-II tahun 2014).

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Penelitian Terdahulu

Berbagai kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Kualitas Laporan Keuangan dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain; 1)..(Herawati Tuti) , Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dengan kesimpulan bahwa Sistem Penendalian Intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 83 %. 2). (Sande Peggy 2013) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kesimpulan bahwa penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain kedua peneliti diatas juga beberapa peneliti lain yang meneliti mengenai Kinerja Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pada dasarnya mempunyai kesimpulan bahwa ada hubungan Positif dan Signifikan Kualitas Laporan Keuangan dan Opini BPK.

Peneliti terdahulu pada umumnya menganalisis Kualitas kinerja keuangan daerah dari Perspektif Prosedur pentasahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk penelitian ini penulis melakukan Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan daerah dari Perspektif lain yakni mengamati Kinerja keuangan dengan

menggunakan alat analisis laporan keuangan berupa analisis efektifitas, efisiensi dan aktifitas.

Adapun **tujuan penelitian** ini adalah untuk mengamati **apakah ada hubungan logis dan positif antara peningkatan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (X) dan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Y), dengan pendekatan analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah.**

Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan keuangan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan suatu entitas tertentu. Untuk itu, dalam melakukan analisis atas laporan keuangan perlu menguraikan pos-pos laporan keuangan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan lainnya guna mengetahui kondisi keuangan entitas untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian yang bersifat dugaan ketidakpastian, sehingga akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia.

Arti penting analisis laporan keuangan memberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Analisis Laporan Keuangan Keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan entitas memenuhi kewajiban termasuk penyediaan dana dan mengevaluasi prestasi manajemen (Modul KKD, 2014)

Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo, 2002)

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi tugas menjalankan roda pemerintahan , pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah kepada DPRD untuk dinilai apakah Pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

salah satu alat untuk menilai Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan Analisis Rasio terhadap Anggaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam praktek ada beberapa teknik analisis laporan keuangan yang bisa diterapkan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan antara lain (Marsudi, 2002) a). Analisis Varians (selisih). b). Analisis Rasio Keuangan. c). Analisis pertumbuhan, d). Analisis regresi , e). Analisis Prediksi, selanjutnya (Halim, 2004) Beberapa rasio yang dapat dikembangkan

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD a).Rasio kemandirian daerah, b).Rasio Efisiensi dan Efektifitas dan c). Rasio Aktivitas.

METODE DAN BAHAN

Penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif , menggunakan teknik Analisis Laporan Keuangan berupa Analisis Rasio dan Analisis Perumbuhan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo tahun 2010 – 2014, dengan menggunakan Rumus Efisiensi, Efektifitas dan Aktivitas sebagai berikut :

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan pendapatan maupun belanja. Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio dicapai minimal sebesar 100%.

Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil realisasi efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik.

Rasio Pertumbuhan Belanja dan PAD

Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{PAD_t - PAD(t-1)}{PAD_t - 1}$$

Rasio Pertumbuhan belanja

$$= \frac{\text{Belanja } t - \text{Belanja}(t-1)}{\text{Belanja } t - 1}$$

Rasio pertumbuhan PAD dan Belanja yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memperoleh PAD dan pertumbuhan APBD dibandingkan dengan periode sebelumnya, semakin besar rasio ini semakin baik

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian

$$= \frac{PAD}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman}}$$

Rasio Kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan daerah yang lebih rendah terhadap pihak lain yang dapat memberikan dana perimbangan dan pinjaman. Semakin besar rasio kemandirian berarti kemandirian keuangan PEMDA semakin baik

Rasio Keselarasan Belanja

Rasio Keselarasan Belanja

$$= \frac{\text{Belanja tidak langsung}}{\text{Belanja Langsung}}$$

Rasio keselarasan belanja yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah. Semakin kecil Rasio ini semakin baik.

Dengan demikian ada 7 (tujuh) variabel yang diamati yakni;

- 1). Efektifitas belanja (X1) ,
- 2). Efektifitas PAD (X2),
- 3). Rasio Efisiensi Belanja (X3) ,
- 4). Rasio pertumbuhan belanja (X4),
- 5). Rasio pertumbuhan PAD (X5),
- 6). Rasio kemandirian daerah(X6) serta,
- 7). Rasio keselarasan belanja (X7)

selanjutnya masing masing variabel dikelompokkan atas 3 (tiga) kriteria yakni ;. Baik sekali Skor 3 (tiga), Baik Skor 2 (dua) dan Kurang Baik Skor 1 (satu).

Dari tujuh variabel tersebut (X1 , X2, X3 ,X4, X5, X6 dan X7) akan diperoleh nilai terendah skor 7 dan tertinggi skor 21, dengan kategori; Nilai skor 7 sampai 11 KURANG BAIK, Nilai skor 12 sampai 14, BAIK dan Nilai skor 15 sampai 21, SANGAT BAIK

Selanjutnya hasil analisis yang diperoleh diperhadapkan dengan Opini LHP BPK, untuk membuktikan Apakah ada Hubungan Logis dan Positif antara Kinerja Keuangan Daerah (dengan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian ini adalah melakukan Analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota palopo tahun 2010 sampai dengan 2014 untuk menentukan kinerja efektifitas , efisiensi dan pertumbuhan

Efektifitas Belanja (X1)

Efektifitas belanja merupakan perbandingan antara target dan realisasi belanja yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan target belanja yang telah ditetapkan dalam APBD dengan kategori; sangat efektif apabila rasio yang dicapai maksimal sama dengan 1 (satu) atau 100 %, sifat normatif dari anggaran belanja tidak dibenarkan melampaui batas anggaran (batas maksimal) kecuali untuk hal-hal yang sifatnya *Emergency*. untuk hal ini dikategorikan: nilai capaian 96% sampai 100 % (sangat efektif) skor 3, nilai capaian antara 92% sampai dengan 95 % (efektif) skor 2, nilai capaian lebih kecil atau sama dengan 91 % Tidak Efektif skor 1.

Tingkat capaian efektifitas belanja Pemerintah Kota Palopo tahun 2010 -2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Rasio Efektifitas Belanja (X1)
Pemerintah Kota Palopo Tahun 2010 -2014

Tahun	Rencana (Rp juta)	Realisasi (Rp Juta)	Hasil (%)	Skor
2010	423.986	386.411	91,02	1
2011	534.199	497.903	93,21	2
2012	541.308	525.772	97,13	3
2013	600.476	581.368	96,82	3
2014	694.859	648.463	93,73	2
JUMLAH SKOR				11

Sumber DPPKAD kota Palopo (Diolah)

Pada tabel 1 diatas terlihat bahwa capaian efektifitas belanja kota palopo selama lima tahun rata-rata diatas 90 %, pada tahun 2010 mencapai 91,02 % (Kurang Baik) skor 2, tahun 2011 mencapai 93,21 %(baik) skor 2, tahun 2012 mencapai 97,13 % (sangat baik) skor 3, tahun 2013 mencapai 96,82 % (Sangat baik) skor 3 dan tahun 2014 mencapai 93,73 %. (baik) skor 2,

Keadaan ini memberi informasi bahwa Pemerintah kota palopo mampu melaksanakan tugasnya untuk merealisasikan belanja semakin baik.

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (X2)

Efektifitas PAD merupakan rasio perbandingan antara target dan realisasi belanja yang menggambarkan Kemampuan daerah untuk merealisasikan Pendapatannya sesuai target yang ditetapkan dalam APBD, hal ini merupakan aspek yang sangat penting karena terkait dengan Kemampuan pemerintah daerah menyediakan dana ril untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. dengan kriteria semakin diatas 100 % atau > 1 semakin efektif (berbeda dengan kriteria efektifitas belanja), untuk hal ini dikategorikan; Capaian Lebih besar 100 % atau > 1 (sangat Efektif) skor 3, capaian 95% – 99 %, Efektif, skor 2 dan capaian dibawah 95 %, Tidak Efektif, skor 1.

Tingkat capaian Efektifitas PAD kota palopo tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel rasio perbandingan target dan realisasi PAD.

Tabel 2
Rasio Efektifitas PAD Kota Palopo (X2)
tahun 2010-2014

Padai tabel 2 diatas terlihat bahwa efektifitas pengelolaan PAD kota Palopo setiap tahun mengalami peningkatan , pada tahun 2010

mencapai 87 % (tidak efektif) skor 1 kemudian pada tahun 2011 mencapai 94 % (tidakEfektif) skor 1, tahun 2012 mencapai 96,18 % (Efektif) , skor 2, tahun 2013 mencapai 99,65 % (efektif) skor 2 dan pada tahun 2014 mencapai 105,4 % (sangat Efektif) skor 3.

Kondisi ini megindikasikan bahwa ada upaya nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-Nya melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

Efisiensi Pendapatan (X3)

Efisiensi merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan, Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan pendapatan dengan biaya seefisien mungkin, dengan kriteria semakin kecil berarti semakin efisien. Standar biaya pungut PAD yang dicapai pemerintah daerah pada umumnya adalah kisaran antara 5 % – 10 % sebagai biaya pungut atas pajak dan retribusi, dengan demikian jika rasio efisiensi lebih kecil atau sama dengan 5 % (sangat efisien) skor 3, capaian antara 6 % sampai 10 % (Efisien) skor 2, capaian lebih besar dari 10 % (Tidak Efisien) skor 1.

Tingkat efisiensi PAD kota Palopo tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Rencana (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	Hasil (%)	Skor
2010	32.270	28.219	87	1
2011	37.963	35.703	94	1
2012	37.653	36.213	100	2
2013	51.844	51.663	99,65	2
2014	77.426	81.649	105,46	3
JUMLAH SKOR				9

Tabel 3
Rasio Efisiensi PAD (X3)
Kota palopo tahun 2010-2014

Tahun	Biaya Pungut PAD (Rp. Juta)	Realisasi PAD (Rp. Juta)	Hasil (%)	Skor
2010	673.25	28.219	2,38	3
2011	417.64	35.703	1,62	3
2012	567.08	36.213	1,57	3
2013	463.20	51.663	0,90	3
2014	1019.52	81.649	1,38	3
JUMLAH SKOR				15

Sumber DPPKAD kota Palopo (Diolah).

Pada tabel 3 diatas terlihat bahwa tingkat Efisiensi PAD Pemerintah Kota Palopo sangat baik yakni rata-rata dibawah 2 %, hal ini lebih rendah dari standar rata-rata yang dilaksanakan oleh berbagai kabupaten/kota yakni kisaran antara 5 sampai dengan 10 %.

Rasio pertumbuhan PAD (X4)

Analisis rasio pertumbuhan adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai. Rasio PAD yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memperoleh PAD dibanding dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas pertumbuhan PAD yang telah dicapai maka dalam analisis ini, penulis bandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) yakni rata – rata 8 % pertahun, dengan kriteria; Rasio Perumbuhan PAD > 8 % (sangat baik) skor 3, Rasio Pertumbuhan PAD Positif < 8 % (Baik) skor 2, dan apabila pertumbuhan PAD Negatif (Kurang baik) skor 1.

Tingkat capaian pertumbuhan PAD Kota Palopo tahun 2010 – 2014 sebagai berikut;

Tabel 4
Rasio Pertumbuhan PAD Kota Palopo (X4)
Tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi PAD (Rp. Juta)	Pert. PAD (%)	Pert. Ek. (%)	Skor
2010	28.219	5	7,6	1
2011	35.703	26	8,16	3
2012	36.213	1,5	8,69	1
2013	51.663	42	8,49	3
2014	81.649	58	7,8	3
JUMLAH SKOR				11

Sumber DPPKAD kota Palopo (Diolah).

Pada tabel 4 diatas terlihat bahwa pertumbuhan PAD kota palopo dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) mencapai rata-rata 26 % jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi (PDRB), Tahun 2010 pertumbuhan PAD 5 % < pertumbuhan ekonomi (kurang baik) skor 1, tahun 2011 pertumbuhan PAD 26 % > Pertumbuhan Ekonomi (sangat baik) skor 3, pada tahun 2012 pertumbuhan PAD 1,5 % < pertumbuhan ekonomi (Kurang baik) skor 1, tahun 2013 pertumbuhan PAD 42 % (sangat baik) skor 3, tahun 2014 pertumbuhan PAD 58 > pertumbuhan ekonomi (sangat baik) skor 3.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota palopo semakin mampu merealisasikan setiap potensi PAD yang muncul dari proses pertumbuhan ekonomi.

Rasio Pertumbuhan Belanja (X5)

Rasio pertumbuhan belanja untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan kinerja belanja yang telah dicapai dari priode sebelumnya. Kualitas kinerja belanja sangat dipengaruhi tingkat inflasi, artinya jika rasio pertumbuhan belanja lebih kecil dari tingkat inflasi maka kuantitas barang yang diperoleh cenderung menurun. Tingkat inflasi Kota Palopo 2010 – 2014 rata-rata 4 % dengan demikian jika pertumbuhan Belanja > 4 % (sangat Baik) skor 3, Pertumbuhan Belanja = 4 % (Baik) skor 2, Pertumbuhan PAD < 4 % (Kurang Baik) skor 1.

Tingkat pertumbuhan belanja Kota Palopo 2010 – 2014 sebagai berikut;

Tabel 5
Rasio Pertumbuhan Belanja (X5)
Kota Palopo Tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi Belanja (Rp. Juta)	Pertumbuhan Belanja (%)	Rata-rata inflasi (%)	Skor
2010	386.411	3,8	4	1
2011	497.903	29	4	3
2012	525.772	5,5	4	3
2013	587.768	11,7	4	3
2014	648.463	10,40	4	3
JUMLAH SKOR				13

Sumber DPPKAD kota Palopo (Diolah).

Pada tabel 5 diatas terlihat bahwa tingkat pertumbuhan belanja kota palopo dalam kurun waktu lima tahun rata-rata 12 % jauh lebih besar dari tingkat inflasi, tahun 2010 pertumbuhan belanja 3,8 % < 4 (kurang baik) skor 1, tahun 2011 pertumbuhan belanja 29 % > 4 (sangat baik) skor 3, tahun 2012 pertumbuhan belanja 5,5 % > 4 (sangat baik) skor 3, tahun 2013 pertumbuhan belanja 11,7 % > 4 (sangat baik) skor 3 dan tahun 2014 pertumbuhan belanja sebesar 29,5 % > 4 (sangat baik) skor 3.

Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Palopo semakin mampu meningkatkan pertumbuhan belanja dan mengendalikan tingkat inflasi.

Rasio Keselarasan belanja (X6)

Rasio keselarasan Rasio keselarasan belanja merupakan perbandingan antara alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyelaraskan anggaran antara belanja berupa program dan kegiatan pembangunan sarana - prasarana publik dengan belanja yang sifatnya operasional berupa belanja rutin, dengan kriteria semakin besar alokasi anggaran untuk belanja langsung semakin baik, dengan demikian apabila

Rasio Belanja tidak langsung < dari rasio belanja langsung atau < 1 (Sangat baik) skor 3, rasio belanja tidak langsung sama dengan belanja langsung atau sama dengan 1 (Baik) skor 2 dan jika belanja tidak langsung > belanja langsung atau > 1 (kurang Baik) skor 1.

Tingkat keselarasan belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Rasio Keselarasan Belanja (X6)
Kota Palopo Tahun 2010-2014

Tahun	BTL (Rp. Juta)	BL (%)	Hasil (%)	Skor
2010	232.260	191.726	121	1
2011	267.251	266.948	100	2
2012	303.076	238.232	127	1
2013	322.376	178.100	115	1
2014	370.006	324.863	114	1
JUMLAH SKOR				6

Sumber DPPKAD kota Palopo (Diolah).

Pada tabel 6 diatas terlihat bahwa , rasio keselarasan belanja kota palaopo pada 2010 sebesar 121 % atau > 1 (kurang baik) skor 1, pada tahun 2011 sebesar 100 % atau sama dengan 1 (Baik) skor 2, pada tahun 2013 sebesar 127 % (kurang baik) skor 1, tahun 2014 sebesar 115 % (kurang baik) skor 1 dan pada tahun 2014 sebesar 114 % (kurang baik) skor 1, Keadaan ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam hal keselarasan belanja tergolong kurang baik, namun demikian ada indikasi bahwa Pemerintah Kota Palopo sudah berupaya untuk memperbaiki tingkat keselarasan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung, hal ini terlihat bahwa pada tahun 2012, 2013 dan 2014 ada kecenderungan rasio keselarasan belanja semakin menurun.

Rasio Kemandirian Daerah (X7)

Rasio kemandirian daerah merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim Abdul, 2007).

Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah berarti semakin rendah ketergantungan daerah kepada sumber dana lain, sebaliknya semakin rendah rasio kemandirian keuangan daerah berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan pada sumber dana lain (dana perimbangan). Tingkat kemandirian pemerintah daerah kabupaten kota secara umum masih rendah, yaitu berada pada kisaran antara 10 % sampai dengan 30 %, dengan demikian jika tingkat kemandirian > 30 % (sangat Baik) skor 3, tingkat kemandirian 20 – 30 % (baik) skor 2 dan jika tingkat kemandirian daerah < 10 % (kurang baik) skor 1.

Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Palopo tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 7
Rasio Kemandirian Daerah (X7)
Kota Palopo Tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi PAD (RP.JUTA)	Dana perimbangan Rp. Juta)	Hasil (%)	Skor
2010	28.219	323.691	8,7	1
2011	35.703	347.878	10,26	2
2012	36.213	421.381	8,59	1
2013	51.663	466.847	11,07	2
2014	81.649	583.726	14	2
JUMLAH SKOR				8

Sumber DPPKAD kota Palopo (Diolah).

Pada tabel 7 diatas terlihat bahwa pada tahun 2010, tingkat kemandirian pemerintah kota palopo sebesar 8,7 % < 10 % (kurang baik) skor 1, pada tahun 2011 sebesar 10,26 % > 10 % (baik) skor 2, pada tahun 2012 sebesar 8,58 % (kurang baik) skor 1, pada tahun 2013 sebesar 11,07 % > 10 % (baik) skor 2 dan pada tahun 2014 sebesar 14 % > 10 % (baik) skor 2. Hal demikian mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Palpo cenderung meningkat kearah yang lebih baik .

Hasil Penelitian Dan Analisis

Secara parsial Kinerja Pengelolaan kota palopo untuk 7 variabel yang diamati (X1, X2, X3, X4,X5, X6 dan X7) sebagai berikut;

Tabel 8
Hasil Penelitian Kinerja Pengelolaan
Keuangan Kota Palopo tahun 2010-2014

X	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
X1	1	2	3	3	2
X2	1	1	2	2	3
X3	3	3	3	3	3
X4	1	3	1	3	3
X5	1	3	3	3	3
X6	1	2	1	1	1
X7	1	2	1	2	2
skor	10	16	14	17	17

Dari Tabel 8 (hasil Penelitian) selanjutnya dilakukan **interpretasi** terhadap jumlah skor untuk menentukan apakah kinerja pengelolaan keuangan setiap tahun Sangat baik atau kurang baik. sesuai kategori skor yang telah ditetapkan, yakni ; skor 7 - 11 (KURANG BAIK), Skor 12 – 16 (BAIK), Skor 17 – 21 (SANGAT BAIK):

1. Tahun 2010 skor 10, kategori kurang baik (negatif).
2. Tahun 2011 skor 16, kategori Baik (positif).
3. Tahun 2012 skor 14, kategori Baik (positif).
4. Tahun 2013 skor 17, kategori Sangat Baik (positif).
5. Tahun 2014 skor 17, kategori Sangat Baik (positif).

Untuk membuktikan apakah ada hubungan positif dan logis antara kinerja pengelolaan keuangan (X) dengan Opini LHP-BPK (Y) maka hasil penelitian diatas diperbandingkan dengan Opini BPK terhadap laporan keuangan kota palopo 2010-2014 sebagai mana pada tabel berikut :

Tabel 9
Hubungan Antara Variabel X dan Y

Tahun	Variabel X	Variabel Y	Hubungan
2010	Kurang baik (negatif)	Disclaimer (Negatif)	Positif dan Logis
2011	Baik (positif).	Disclaimer (Negatif)	Negatif/ tidak logis
2012	Baik (positif)	WDP (positif)	Positif/logis
2013	Sangat baik (positif)	Disclaimer (negatif)	Negatif /tidak logis
2014	Sangat baik (positif)	WDP (positif)	Positif/logis

Dari tabel 9 diatas terlihat bahwa dari lima tahun Laporan keuangan yang dianalisis ada tiga tahun (tahun 2010, 2012 dan 2014) yang menggambarkan ada hubungan positif dan logis antara Kinerja Pengelolaan keuangan daerah (X) dan opini LHP-BPK (Y), yakni pada tahun 2010 kondisi kinerja keuangan kurang baik dan mendapat opini disclaimer (hubungan positif dan logis), tahun 2012 kinerja keuangan baik dan mendapat Opini WDP (hubungan positif dan logis) , dan pada tahun 2014 kinerja keuangan sangat baik dan mendapat Opini WDP (hubungan positif dan logis).

Untuk tahun 2011 dan 2013 memperlihatkan hubungan negatif antara variabel X dan Y , terhadap hal ini peneliti menelusuri lebih lanjut melalui resume pemeriksaan BPK dan wawancara dengan Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD} Kota Palopo, diperoleh informasi dan fakta bahwa kondisii 2011 dan 2013 sifatnya *kasuistik*, berupa penyalahgunaan wewenang dan penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak sesuai prosedur serta tidak memenuhi kriteria pengungkapan (*Disclosure*).

Dengan demikian Hasil analisis, informasi dan fakta memperlihatkan dan membuktikan bahwa **ada hubungan positif dan logis antara kinerja pengelolaan keuangan (X) dengan Opini LHP BPK (Y)**, dengan kesimpulan bahwa apabila Kinerja Keuangan suatu daerah kategori baik atau sangat baik dari perspektif hasil analisis laporan keuangan daerah, maka sangat berpeluang untuk mendapat penilaian Opini BPK kategori Unqualified Opinion (WTP) atau Qualified

Opinium (WDP) sepanjang tidak terjadi hal-hal yang sifatnya *kasuistik* dan berpotensi merugikan Negara atau Daerah.

Hubungan logis dan positif antara Kinerja pengelolaan keuangan daerah dan Opini laporan hasil pemeriksaan BPK, dapat menjadi inspirasi bagi SKPD dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam melaksanakan tugas visi dan Misi-nya tidak perlu Fokus dan Berorientasi pada bagaimana memperoleh Predikat LHP-BPK yang WDP atau WTP, tetapi yang seharusnya setiap Pimpinan SKPD harus Fokus pada upaya bagaimana meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan menjadi lebih baik. Dengan memperbaiki kinerja Pengelolaan Keuangan maka peluang dan potensi untuk memperoleh WDP atau WTP menjadi nyata.

SIMPULAN

a). Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari keadaan yang kurang baik (tahun 2010) menjadi sangat baik (tahun 2014) b). Hubungan Kinerja Pengelolaan Keuangan (X) dengan LHP BPK (Y), pada tahun 2010 mempunyai hubungan positif dan logis, tahun 2011 hubungan negatif dan tidak logis, tahun 2012 hubungan positif dan logis, tahun 2013 hubungan negatif dan tidak logis dan pada tahun 2014 hubungan positif dan logis. c). Dari lima tahun laporan keuangan yang diamati, ada tiga tahun yang memperlihatkan hubungan yang positif (searah) antara variabel X dan Y, dengan demikian membuktikan pertanyaan peneliti bahwa ; bahwa ada hubungan hubungan positif dan logis antara variabel X dan Y.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK Republik Indonesia, *Ikhtisar LHP Semester II*, tahun 2014
- Halim Abdul (2007), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba empat, Jakarta,
- Herawati Tuti 2014, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur*, STAR- Study & Accounting Research, Volume XI, nomor 1,
- Kementerian Keuangan RI (2014), *Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Penatausahaan/ Akuntansi Keuangan*, DJPK, Jakarta
- Mahmudi (2007), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta
- Prasetya Gede Edy (2005), *Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Sande Peggy (2013), *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Skripsi Program Studi Akuntansi FE Universitas Padang.
- Pemerintah Kota Palopo, *Laporan Keuangan tahun 2010 – 2014*.
- Peraturan Pemerintah RI nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*
- Pemerintah RI, *Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*.